



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024

DINAS PARIWISATA KOTA PANGKAL PINANG

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

LKjIP merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada suatu Perencanaan Strategik (Renstra) yang telah ditetapkan.

Metode dan teknik penyusunannya LKjIP ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003, tanggal 23 Maret 2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata tahun 2024 ini pada dasarnya merupakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan di Dinas Pariwisata Tahun 2024, merupakan upaya memenuhi kewajiban dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang tahun 2024-2026.

LKjIP Tahun 2024 merupakan bahan umpan balik, pedoman dan petunjuk bagi penanggungjawab kegiatan, pemimpin kegiatan, pelaksana kegiatan dan panitia serta stakeholder Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang untuk menyusun langkah-langkah strategis guna meningkatkan kinerjanya pada tahun 2025, sehingga Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan transparansi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disahkan oleh DPRD menjadi suatu kegiatan Pemerintah Kota Pangkal Pinang yang utuh dapat terlaksana dengan baik.

Di samping kegiatan-kegiatan yang telah disetujui anggarannya oleh eksekutif dan legislatif, Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang pada tahun 2024, sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang pariwisata yang dapat meningkatkan pengembangan kepariwisataan.

Tentu saja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di atas harus dilakukan koordinasi baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal seperti melakukan kerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi, serta kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha.

LKjIP Tahun 2024 selanjutnya akan disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait khususnya kepada DPRD Kota Pangkal Pinang, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Lembaga Pengawas dan Tim Penilai Akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

Dengan segala kekurangan yang dimiliki dalam penyusunan atau penyampaian LKjIP Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 diharapkan saran dan pendapat pada semua pihak guna perbaikan dan penyempurnaannya, akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa selalu melindungi dan menuntun kita untuk bersama-sama meningkatkan kinerja berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama dalam berbuat yang terbaik bagi Kota Pangkal Pinang.

Pangkal Pinang, Januari 2025

Pt, Kepala Dinas Pariwisata  
Kota Pangkal Pinang,  
  
Drs. WASPADA  
PEMBINA/ IVa  
NIP/196705051998021001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang dikemukakan tingkat capaian kinerja yang telah ditentukan selama tahun 2024.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2024, Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang, terdapat 1 tujuan yang dijabarkan kedalam 1 sasaran dengan 4 (empat) indikator yang diimplementasikan dalam 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.170.219.357,00 (Sepuluh milyar seratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 9.833.265.436,40 (Sembilan milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh enam koma empat nol rupiah) atau sebesar 96,69%.

Secara keseluruhan dapat diinformasikan, bahwa hasil capaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang tahun 2024 sudah memenuhi seluruh sasaran strategis yang ditargetkan pada tahun 2024.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang tahun 2024 ini menggambarkan hasil pengukuran, evaluasi kinerja dan analisis pencapaian kinerja serta aspek keuangan, sebagai berikut :

1. Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian program dan sasaran kinerja sampai ke dampak.
2. Hasil analisis terhadap pencapaian kinerja dan aspek keuangan.

Pencapaian sasaran dan program stratejik Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang tahun 2024 cukup signifikan. Adapun indikator kunjungan wisatawan pada tahun 2023 sejumlah 351.906 orang, kemudian pada tahun 2024 sejumlah 311.077 orang, yang berarti mengalami penurunan sebesar -11,60%, untuk indikator rata-rata lama tinggal wisatawan mengalami kenaikan dimana pencapaian pada tahun 2023 adalah 1,06 hari sedangkan capaian pada tahun 2024 adalah 1,62 hari. Capaian indikator tingkat hunian akomodasi pada tahun 2023 adalah 37,90% dan mengalami kenaikan pada tahun 2024 dengan capaian 32,20%. Sedangkan indikator persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki izin mengalami kenaikan capaian pada tahun 2024 sebesar 83,23%, dimana capaian tahun 2023 sebesar 72,57%.

## DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang .....	4
1.3. Aspek Strategis .....	8
1.4. Isu Strategis .....	11
1.5. Sistematika Penyusunan Lakip .....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	14
2.1. Tujuan dan Sasaran .....	14
2.2. Strategi dan Kebijakan .....	15
2.3. Indikator Kinerja Utama.....	16
2.4. Perjanjian Kinerja.....	17
2.5. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	25
3.1. Akuntabilitas Kinerja.....	25
3.2. Metode Pengukuran Kinerja .....	25
3.3. Analisis Pencapaian Kinerja .....	27
3.4. Analisis Keuangan .....	40
3.5. Analisis Ketersediaan SDM Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran .....	42
3.6. Evaluasi dan Tindak Lanjut .....	42
BAB IV PENUTUP.....	44
4.1. Simpulan Capaian Kinerja.....	44
4.2. Permasalahan dan Tantangan .....	44
4.3. Rekomendasi Perbaikan .....	45
4.4. Harapan dan Komitmen Kedepan .....	45
LAMPIRAN .....	46

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan dapat dikatakan berhasil jika mampu mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita yang diharapkan dengan menerapkan penyelenggaraan *good governance*. Di samping itu, diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate*. *Good governance* yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktik terbaiknya disebut “*good governance*” (kepemerintahan yang baik). Agar “*good governance*” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, *private sector* dan masyarakat.

*Good governance* yang efektif menuntut adanya “*alignment*” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Berkenaan dengan itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama bagi masyarakat luas akan ketersediaan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk



pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Berikutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan setelah melalui proses panjang dikuatkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas,

maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Beranjak dari Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 – 2026, Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang (Renja) Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LKjIP Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama.

Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra dan realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan jajarannya kepada Walikota ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2024.



## **1.2. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang**

### **1.2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang adalah unsur pelaksana otonomi daerah bidang Pariwisata yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang dengan Struktur Organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Pangkal Pinang melalui Sekretaris Daerah.

Mengacu pada Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang, dimana Kepala Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata, berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pariwisata;
- b. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Pariwisata;
- d. Penetapan rencana kerja Dinas Pariwisata menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Pariwisata;
- f. Pelaksanaan perencanaan Bidang Pariwisata;
- g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan Pariwisata di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

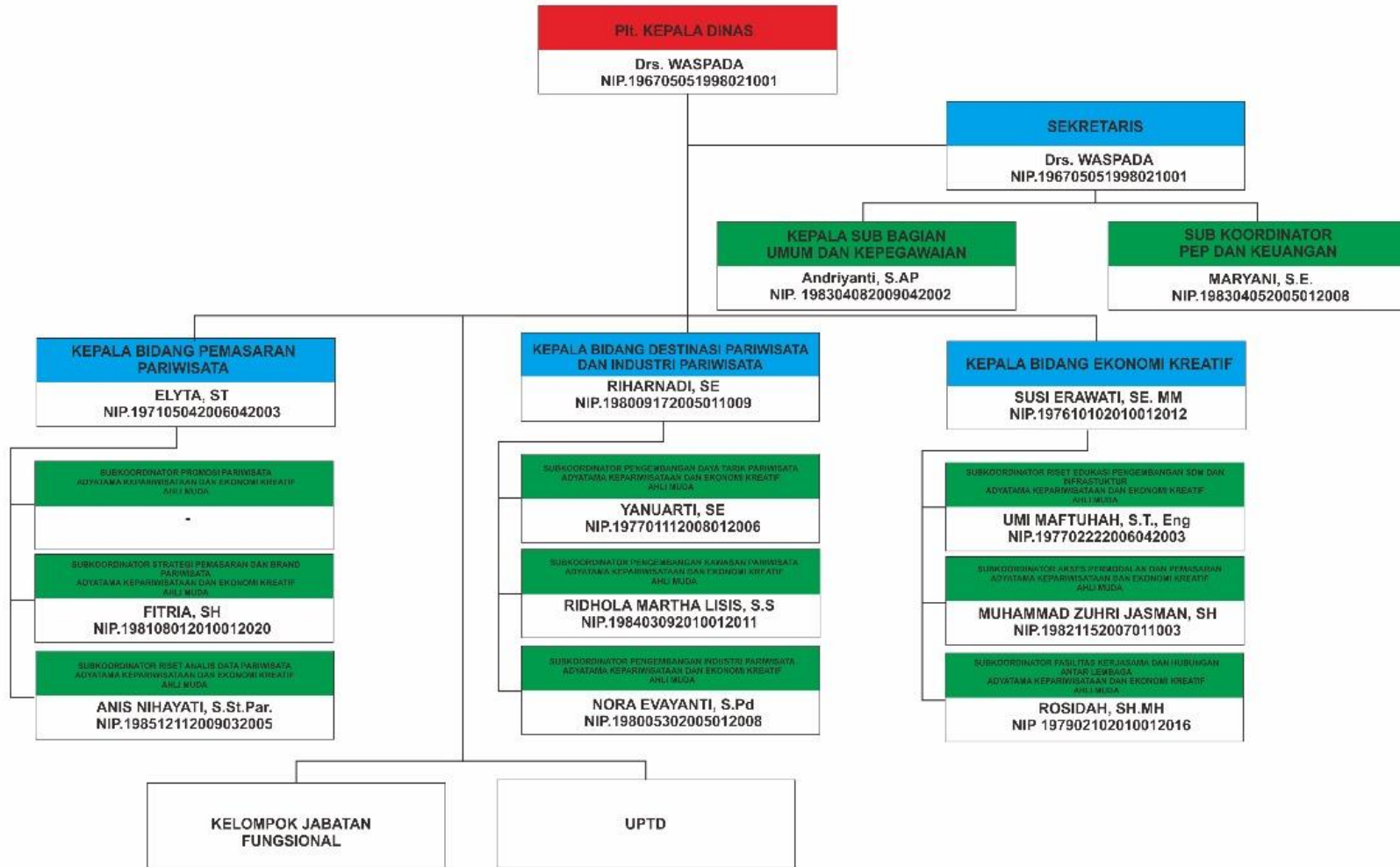
Adapun susunan organisasi Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan/ Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
- c. Bidang Pemasaran Pariwisata
  - Sub Koordinator Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata/ Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
  - Sub Koordinator Promosi Pariwisata/ Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
  - Sub Koordinator Riset Dan Analisis Data Pariwisata/ Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
- d. Bidang Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata
  - Sub Koordinator Pengembangan Daya Tarik Pariwisata/ Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
  - Sub Koordinator Pengembangan Kawasan Pariwisata/ Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
  - Sub Koordinator Industri Pariwisata/ Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
- e. Bidang Ekonomi Kreatif
  - Sub Koordinator Riset, Edukasi, Pengembangan SDM dan Infrastruktur/ Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
  - Sub Koordinator Akses Permodalan dan Pemasaran/ Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
  - Sub Koordinator Fasilitasi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga/ Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda

Struktur organisasi secara rinci, sebagai berikut :



## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA KOTA PANGKALPINANG



### 1.2.2. Sumber Daya Manusia Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang

Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang memiliki Personalia/ Sumber Daya Manusia berjumlah 75 orang terdiri atas 28 ASN dan 47 PHL dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan. Untuk jelasnya seperti di bawah ini:

#### a. Berdasarkan Golongan/ Kelas

Golongan/ Kelas	a	b	c	d	Kelas	Jumlah
Gol. I	-	-	-	-	-	-
Gol. II	-	-	-	1	-	1
Gol. III	1	9	3	9	-	22
Gol. IV	4	-	-	-	-	4
Kelas IX	-	-	-	-	1	1
Total						28

#### b. Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Struktural	14
2.	Jabatan Fungsional/ Fungsional Umum PNS	13
3.	Fungsional Umum PPPK	1
	Total	28

#### c. Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	S-2	3
2.	S1/DIV	31
3.	D III	4
4.	D I	-
5.	SLTA	16
6.	SLTP	2
7.	SD	3
8.	Tidak Tamat SD	16
	Jumlah	75

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Kantor Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya yaitu :

1. Bangunan Kantor

Bangunan kantor terletak di jalan Rasakunda Bukit Intan Pangkal Pinang dengan luas 1.540 M<sup>2</sup>.

2. Inventaris/ Peralatan Kantor

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan APBD Kota Pangkal Pinang.

3. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dimiliki per 31 Desember 2024 sebanyak 1 unit Honda Mobilio, 1 unit Suzuki Ertiga dan 4 unit kendaraan roda 2.

4. Fasilitas/ Perlengkapan Lainnya

Fasilitas dan perlengkapannya lainnya yang dimiliki terdiri dari sarana dan prasarana pada objek-objek wisata baik yang diperoleh dari APBD Kota Pangkal Pinang maupun dari APBN melalui dana DAK Fisik.

### 1.3. Aspek Strategis

Dalam memenuhi amanat dan cita-cita pembangunan sebagaimana target yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 3 tahun melalui Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026. Target pembangunan dimaksud diterjemahkan kembali dalam dokumen perencanaan di masing-masing satuan kerja melalui Rencana Strategis (RENSTRA) 2024–2026 berikut target *output* dan *outcome* yang akan dicapai untuk selanjutnya diuraikan kembali ke dalam dokumen perencanaan tahunan. Tahapan tersebut telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang terutama dalam mewujudkan pelaksanaan program kegiatan secara efektif, efisien dan berkesinambungan.

Renstra Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang telah mengalami perubahan yang signifikan diselaraskan dengan restrukturisasi program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang. Penetapan tujuan dan

sasaran organisasi pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan lebih terarah sesuai dengan potensi, hambatan dan kendala yang ada. Karenanya diperlukan analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal guna menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut.

Dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal sekaligus dengan berbagai perkiraan dan asumsi dinamikanya di masa yang akan datang, maka dapat dilakukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dengan menggunakan metode analisis SWOT. Analisis SWOT dilakukan untuk dapat menyusun 4 strategi yaitu:

- a. strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
- b. strategi menekan atau meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang;
- c. strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman; dan
- d. strategi menekan atau meminimalisir kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

Berdasarkan analisis SWOT dengan mempertimbangkan isu strategis ditetapkan faktor keberhasilan yaitu kondisi yang harus ada sebagai prasyarat keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Analisis terhadap lingkungan organisasi Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang adalah sebagai berikut :

#### **Lingkungan Internal :**

##### **1. Kekuatan (*Strength*)**

Kekuatan adalah situasi yang mengambil keuntungan dari peluang yang ada dan membantu mencapai tujuan dari dalam (internal). Kekuatan Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang untuk urusan pariwisata yaitu sebagai berikut:

- a. Banyaknya pelaksanaan event pariwisata;
- b. Dukungan teknologi informasi sebagai sarana informasi wisata;

- c. Daya dukung iklim, suasana dan banyaknya Obyek Daya Tarik Wisata yang menarik minat wisatawan;
- d. Keragaman budaya daerah Kota Pangkal Pinang; dan
- e. Kreatifitas sumber daya manusia yang tinggi, serta banyaknya produk ekonomi kreatif yang dihasilkan.

## 2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan adalah situasi yang dapat menghambat dalam mencapai tujuan dan berasal dari dalam (internal). Kelemahan Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang untuk urusan pariwisata yaitu sebagai berikut:

- a. Kurangnya penguasaan teknologi;
- b. Kurangnya inovasi dari sumber daya manusia pariwisata yang ada; dan
- c. Lemahnya disiplin aparat.

## **Lingkungan Eksternal :**

### 1. Peluang (*Opportunities*)

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang sebagai berikut:

- a. Meningkatnya peran serta stakeholder dalam menciptakan produk-produk unggulan di setiap destinasi wisata;
- b. Banyak dan tingginya minat investor untuk berinvestasi dalam pembangunan dan pengembangan sarana wisata;
- c. Banyaknya industri/jasa pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan;
- d. Banyaknya event pariwisata baik dalam maupun luar daerah guna meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- e. Banyaknya konsumen produk Ekonomi Kreatif.



## 2. Tantangan (*Threats*)

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang untuk urusan pariwisata yaitu sebagai berikut:

- a. Perjalanan yang dilakukan ke Kota Pangkal Pinang cenderung untuk perjalanan bisnis/ pekerjaan;
- b. Tingkat hunian akomodasi belum maksimal dikarenakan kegiatan di hotel hanya sebatas rapat/pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi/ pemerintah;
- c. Masih tingginya inflasi di Kota Pangkal Pinang;
- d. Tuntutan inovasi produk Ekonomi Kreatif; dan
- e. Pemanfaatan teknologi dalam sektor Ekonomi Kreatif.

### 1.4. Isu Strategis

Dalam rangka menuju *good governance*, isu strategis yang berkembang saat ini adalah pemerintah dituntut untuk melaksanakan reformasi birokrasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan prima. Organisasi publik (pemerintah) pada dasarnya merupakan institusi yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik berupa pelayanan yang bersifat langsung diberikan kepada masyarakat maupun pelayanan yang dinikmati masyarakat secara tidak langsung.

Posisi masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan suatu pelayanan masih disalah artikan oleh bagian pengelola pelayanan publik, sehingga aparatur cenderung menganggap masyarakat sebagai orang yang harus melayani, bukan yang harus dilayani. Disisi lain masih lemahnya kontrol yang tegas dari pemerintah atas tindakan-tindakan pelayanan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku.

Pada Dinas Pariwisata terdapat pelayanan langsung maupun tidak langsung yang diberikan kepada masyarakat. Adapun pelayanan langsung tersebut berupa layanan penerbitan surat izin penyelenggaraan acara dan pelayanan pemberian informasi kepada para wisatawan baik di bandara, TIC Pantai Pasir Padi maupun di galeri Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang.

Sedangkan pelayanan tidak langsung dilakukan melalui website dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat tentang info-info kepariwisataan yang ada di Kota Pangkal Pinang, sehingga para wisatawan tertarik untuk datang ke Kota Pangkal Pinang.

Adapun isu strategis yang ada di Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang, meliputi :

1. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kelembagaan yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. Masih kurangnya peran serta dan kerjasama antar pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah, swasta dan lainnya) dalam pengembangan pariwisata daerah;
3. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana serta pengelolaan kawasan dan daya tarik wisata;
4. Belum optimalnya pemasaran destinasi pariwisata.

#### **1.5. Sistematika Penyusunan LAKIP**

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang adalah sebagai berikut :

##### **KATA PENGANTAR**

##### **IKTISAR EKSEKUTIF**

##### **DAFTAR ISI**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menguraikan gambaran singkat sasaran yang ingin dicapai pada tahun yang bersangkutan serta kaitannya dengan capaian visi dan misi dinas; RENSTRA berisi uraian singkat visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan serta program daerah; Renja yang berisi uraian kegiatan dalam rangka mencapai sasaran daerah sesuai dengan program pada tahun yang bersangkutan dan indikator kinerja keberhasilan pencapaiannya serta Penetapan Kinerja.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Menguraikan akuntabilitas keuangan yang berisi analisis keuangan daerah pada tahun tersebut. Aspek pendukung lainnya berisi kondisi sumber daya manusia, aset daerah, dan sebagainya serta tindak lanjut hasil evaluasi tahun lalu yang berisi perbaikan yang telah dilakukan terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP oleh MenPAN.RB/ BPKP/ Inspektorat.

### **BAB IV PENUTUP**

Menggambarkan simpulan capaian kinerja daerah tahun tersebut, permasalahan dalam mencapai kinerja serta solusi/pemecahan masalah.

### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023. Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkal Pinang salah satu tujuan Kota Pangkal Pinang adalah Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Dasar melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi dan sasaran Kota Pangkal Pinang Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah dengan indikator Realisasi Investasi.

Dalam rangka mewujudkan SAKIP Kota Pangkal Pinang dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi salah satu kriteria dalam mewujudkan hal tersebut, maka dilakukan Revisi Renstra dengan menggandeng KEMENPANRB yang mana menghasilkan beberapa perubahan terkait Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target RENSTRA.

#### **2.1. Tujuan dan Sasaran**

##### **2.1.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan Renstra Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang tahun 2024 adalah Meningkatkan potensi pariwisata dengan target Persentase PAD sektor pariwisata terhadap pendapatan sebesar 10%.

Tujuan tersebut dalam rangka pencapaian target tujuan Kota Pangkal Pinang Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pembangunan infrastruktur dasar melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4%.

### **2.1.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tujuan Dinas Pariwisata tahun 2024 adalah Meningkatnya daya tarik daerah tujuan wisata dengan indikator dan target sebagai berikut :

1. Jumlah kunjungan wisatawan dengan target 214.753 orang
2. Rata-rata lama tinggal wisatawan dengan target 1 hari
3. Tingkat hunian akomodasi dengan target 25%
4. Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki izin dengan target 73,57%

Sasaran tersebut dalam rangka pencapaian target sasaran Kota Pangkal Pinang yaitu Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah sebesar 500 milyar.

## **2.2. Strategi dan Kebijakan**

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi yang digunakan Dinas Pariwisata dalam rangka pencapaian sasaran adalah Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan sarana pariwisata melalui pembangunan infrastruktur, SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan promosi, kemitraan dan kelembagaan pariwisata.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan

tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kinerja yang akuntabel dan pelayanan prima pada Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang;
2. Peningkatan sarana dan prasarana di objek wisata dalam rangka mendukung pengembangan daya tarik wisata;
3. Peningkatan promosi pariwisata secara masif melalui media cetak dan elektronik;
4. Pembinaan dan peran serta pelaku ekonomi kreatif; dan
5. Meningkatkan kualitas SDM pelaku ekonomi kreatif.

### 2.3. Indikator Kinerja Utama

Uraian indikator kinerja dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2024 dan sebagai pedoman dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 (*berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026*) adalah sebagai berikut :

**TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PARIWISATA KOTA PANGKAL PINANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
1.	Meningkatnya daya tarik daerah tujuan wisata	Jumlah kunjungan wisatawan	214.753 orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara pada tahun berkenaan</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang</li> </ul>
		Rata-rata lama tinggal wisatawan	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Pengukuran : Rata-rata lama tinggal wisatawan tahun berkenaan</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang</li> </ul>

		Tingkat hunian akomodasi	25%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah kamar yang terjual / Jumlah kamar yang tersedia x 100 %</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang</li> </ul>
		Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki izin	73,57%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki izin dibagi jumlah pelaku ekonomi kreatif keseluruhan x 100%</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang</li> </ul>

#### 2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan yang berupa pernyataan komitmen oleh pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur, hal ini sangat penting karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar reevaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan atas pengembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.



Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**TABEL PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PARIWISATA KOTA PANGKAL PINANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya daya tarik daerah tujuan wisata	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	214.753
		Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	1
		Tingkat hunian akomodasi	%	25
		Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki izin	%	73,57

## 2.5. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Dilaksanakan dengan kegiatan :

#### 1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Indikator : Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Biaya : Rp 3.262.278.462,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

##### 1.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Indikator : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
- Biaya : Rp 3.262.278.462,-

## 1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Indikator : Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah
- Biaya : Rp 190.316.905,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

### 1.2.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Indikator : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
- Biaya : Rp 4.243.000,-

### 1.2.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Indikator : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
- Biaya : Rp 18.864.100,-

### 1.2.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Indikator : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
- Biaya : Rp 17.392.500,-

### 1.2.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Indikator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Biaya : Rp 149.817.305,-

## 1.3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Indikator : Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah
- Biaya : Rp 33.700.000,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

### 1.3.1. Pengadaan Mebel

- Indikator : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
- Biaya : Rp 33.700.000,-

#### 1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Indikator : Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Biaya : Rp 355.289.889,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

##### 1.4.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
- Biaya : Rp 70.399.419,-

##### 1.4.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
- Biaya : Rp 27.379.250,-

##### 1.4.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
- Biaya : Rp 257.511.220,-

#### 1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Indikator : Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik
- Biaya : Rp 176.645.426,57,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

##### 1.5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Indikator : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
- Biaya : Rp 36.092.220,-

1.5.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Indikator : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
- Biaya : Rp 33.252.300,-

1.5.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Indikator : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi
- Biaya : Rp 107.300.906,57

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Dilaksanakan dengan kegiatan :

2.1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- Indikator : Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- Biaya : Rp 526.240.970,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

2.1.1. Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- Indikator : Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- Biaya : Rp 526.240.970,-

2.2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

- Indikator : Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- Biaya : Rp 3.910.885.062,83

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

2.2.1. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi

- Indikator : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara
- Biaya : Rp 3.645.295.292,83

2.2.2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

- Indikator : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- Biaya : Rp 265.2889.770,-

3. Program Pemasaran Pariwisata

Dilaksanakan dengan kegiatan :

3.1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- Indikator : a. Jumlah promosi event pariwisata yang dilaksanakan  
b. Persentase data pariwisata yang dikelola  
c. Persentase industri pariwisata yang difasilitasi dalam kegiatan promosi Pariwisata
- Biaya : Rp 858.956.753,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

3.1.1. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

- Indikator : Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
- Biaya : Rp 428.786.131,-

3.1.2. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

- Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media

Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

- Biaya : Rp 430.170.622,-

4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Dilaksanakan dengan kegiatan :

4.1. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

- Indikator : Persentase Komunitas Ekonomi Kreatif yang memperoleh insentif
- Biaya : Rp 178.033.200,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

4.1.1. Pengembangan Sistem Pemasaran

- Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif
- Biaya : Rp 178.033.200,-

5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dilaksanakan dengan kegiatan :

5.1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

- Indikator : Persentase Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
- Biaya : Rp 101.819.047,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

5.1.1. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata

- Indikator : Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata
- Biaya : Rp 101.819.047,-

## 5.2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

- Indikator : Persentase SDM Parwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif yang memperoleh Sertifikasi
- Biaya : Rp 239.099.721,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

### 5.2.1. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

- Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
- Biaya : Rp 129.484.000,-

### 5.2.2. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif

- Indikator : Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif
- Biaya : Rp 109.615.721,-

Pada tahun 2024 Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang melaksanakan 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan besaran atau total biaya yakni sebesar Rp 9.833.265.436,40 (Sembilan milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh enam koma empat nol rupiah). Sedangkan di tahun 2023 Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang melaksanakan 5 (lima) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan dengan besaran atau total biaya yakni sebesar Rp 7.848.022.047,- (Tujuh milyar delapan ratus empat puluh delapan juta dua puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah).



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Akuntabilitas Kinerja**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang yang dibuat sesuai ketentuan yang telah diamanatkan.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran dan penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA 2024-2026 maupun Rencana Kinerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja 2024 dan Indikator Kinerja Utama RENSTRA 2024-2026.

#### **3.2. Metode Pengukuran Kinerja**

Kinerja Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Dinas Pariwisata Kota

Pangkal Pinang dalam mendukung pencapaian sasaran RPD 2024-2026 serta tujuan dan sasaran dinas tahun 2024.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja dan pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Adapun Kerangka pengukuran kinerja yang berdasar pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 adalah dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran apakah melebihi target, sesuai target atau tidak mencapai target, digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

**Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	>100 %	Baik Sekali	
2	75 % s.d. 100 %	Baik	
3	55 % s.d. 74 %	Cukup	
4	< 55 %	Kurang	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

### 3.3. Analisis Pencapaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Hingga akhir tahun 2024, Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah menjadi tanggungjawab. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran, dapat dilihat pada penjelasan berikut.

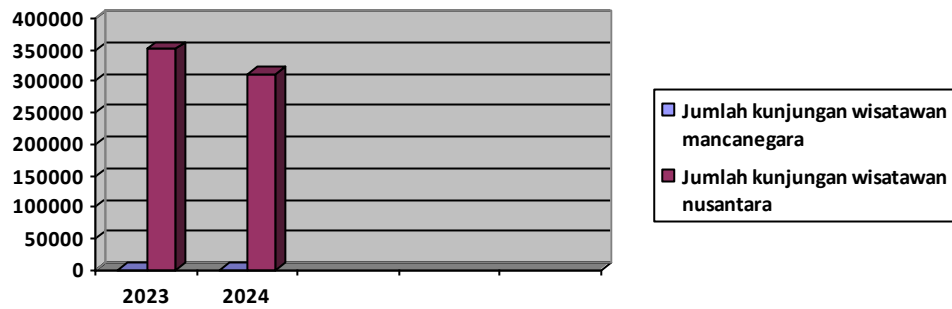
**Sasaran :**

***Meningkatnya daya tarik daerah tujuan wisata***

Pencapaian sasaran meliputi 4 (empat) indikator dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Rasio
	target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian	
Jumlah kunjungan wisatawan	177.884 orang	351.906 orang	197.88 %	214.753 orang	311.077 orang	144,85 %	-11,60 %



Jumlah kunjungan wisatawan tingkat kota Pangkal Pinang tahun 2024 mengalami penurunan baik kunjungan wisatawan nusantara maupun kunjungan wisatawan mancanegara dibandingkan dengan tahun 2023, sedangkan untuk tingkat provinsi mengalami penurunan untuk kunjungan wisatawan nusantara dan kenaikan untuk kunjungan wisatawan mancanegara dibandingkan dengan tahun 2023. Sementara itu kunjungan wisatawan mancanegara secara nasional mengalami kenaikan dan pergerakan kunjungan wisatawan nusantara juga mengalami kenaikan secara nasional.

Sasaran jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Pangkal Pinang tahun 2023 dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan dari target sebesar 177.884 orang dan teralisasi 351.906 orang atau 197,88% yang terdiri dari wisatawan nusantara 350.379 orang dan wisatawan mancanegara 1.527 orang. Sedangkan pada tahun 2024 dari target sebesar 214.753 orang dan teralisasi 311.077 orang atau 144,85% yang terdiri dari wisatawan nusantara 309.763 orang dan wisatawan mancanegara 1.314 orang. Terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2023 ke 2024 yaitu sebesar -11,60%.

Kunjungan wisatawan ke Propinsi Kepulauan Bangka Belitung pada pada tahun 2024 sampai dengan periode November kunjungan wisatawan 431.946 orang yang terdiri dari 6.083 orang wisatawan mancanegara dan 425.863 orang wisatawan nusantara. Sedangkan untuk periode yang sama (November) tahun 2023 jumlah kunjungan wisatawan ke Propinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 455.992 orang yang terdiri dari wisatawan mancanegara 4.214 orang dan wisatawan nusantara 451.778 orang, sehingga pada tahun 2024 (periode November) mengalami kenaikan sebesar 44,35% untuk kunjungan mancanegara dan penurunan sebesar -5,27% untuk kunjungan wisatawan nusantara.

Sedangkan untuk kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2024 secara nasional mengalami kenaikan sebesar 8,39% dibandingkan kunjungan pada tahun 2023, dimana jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2023 sejumlah 11.680.000 orang dan pada tahun 2024 sejumlah 12.660.000 orang.

Sementara untuk pergerakan wisatawan nusantara (wisnus), pada periode Januari hingga Oktober 2024 telah mencapai 839,39 juta orang atau meningkat 21,87 % dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 sejumlah 688,78 juta orang.

Kemungkinan alasan penurunan jumlah kunjungan wisatawan nusantara adalah sebagai berikut :

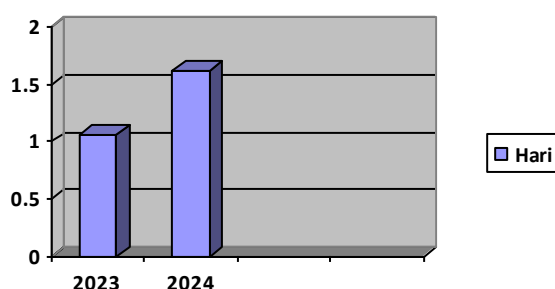
- a. Melemahnya daya beli masyarakat dikarenakan :
  - Dampak kasus PT. Timah; dimana timah merupakan komoditas utama yang mempengaruhi perekonomian Bangka Belitung, baik dari segi produksi maupun harga yang berdampak langsung pada masyarakat setempat.
  - Penurunan pendapatan masyarakat lokal; Banyak sektor yang terkait dengan industri timah seperti perdagangan, jasa dan konsumsi lokal mengalami penurunan pendapatan, hal ini mengurangi belanja masyarakat termasuk pada sektor wisata.
  - Dampak psikologis; Ketidakpastian ekonomi akibat isu ini dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk berlibur atau berinvestasi di sektor pariwisata.
- b. Persaingan dengan destinasi lain  
Destinasi wisata lain mungkin menawarkan atraksi baru atau lebih menarik.
- c. Perubahan tren wisata  
Wisatawan bisa saja beralih ke destinasi yang lebih berfokus pada wisata alam atau daerah yang lebih populer di daerah lainnya.

Sedangkan faktor signifikan yang melatarbelakangi meningkatnya jumlah kunjungan mancanegara antara lain :

1. Melemahnya nilai tukar rupiah dari mata uang asing
2. Banyaknya moment libur internasional (hari-hari besar keagamaan)
3. Menariknya destinasi wisata dan budaya di Indonesia untuk diekslore oleh wisatawan asing

## 2. Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan

Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Rasio
	target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian	
Rata-rata lama tinggal wisatawan	1,5 hari	1,06 hari	70,67 %	1 hari	1,62 hari	162%	52,83 %



Adapun capaian indikator rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Pangkal Pinang pada tahun 2023 adalah 1,06 hari, sedangkan pada tahun 2024 adalah 1,62 hari atau 162% dari target yang ditetapkan yaitu 1hari. Sehingga ada kenaikan sebesar 52,83%. Jadi rata-rata lamanya wisatawan tinggal di Pangkal Pinang dalam 1 tahun dalam waktu sekitar 2 hari.

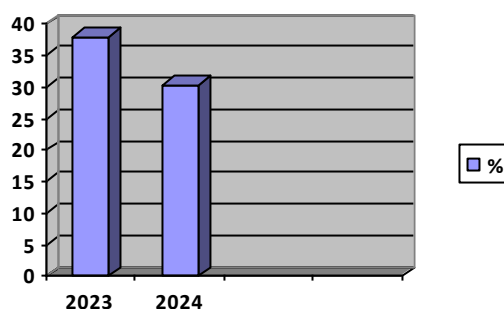
Sedangkan rata-rata lama tinggal wisatawan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023 selama 1,66 hari, sedangkan pada tahun 2024 periode sampai bulan November selama 1,69 hari. Sehingga secara rata-rata lama tinggal wisatawan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mengalami penurunan.

Adapun rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara secara nasional pada tahun 2023 selama 6,85 hari dan 7,53 hari pada tahun 2024, sehingga terjadi kenaikan sebesar 9,93%.

Yang mempengaruhi indikator ini karena Kota Pangkal Pinang terkadang hanya sebagai tempat transit para wisatawan yang berkunjung ke kabupaten lain di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya yang berbatasan langsung dengan Kota Pangkal Pinang, juga karena terbatasnya objek wisata alam di Kota Pangkal Pinang. Akan tetapi para wisatawan tersebut tetap melakukan aktifitas transaksi jual beli seperti makan minum dan belanja oleh-oleh untuk dibawa pulang ke daerah asal di Kota Pangkal Pinang.

### 3. Tingkat hunian akomodasi

Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Rasio
	target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian	
Tingkat hunian akomodasi		37,90%	100%	25%	32,20%	128,80%	-15,04 %



Tingkat hunian akomodasi kota Pangkal Pinang tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023, sedangkan untuk tingkat propinsi dan nasional mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023.

Target indikator tingkat hunian akomodasi kota Pangkal Pinang tahun 2024 adalah 25% dengan capaian indikator sebesar 32,20% atau 128,8% dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan capaian indikator untuk tahun 2023 adalah 37,90% sehingga terjadi penurunan capaian indikator sebesar -15.04%.

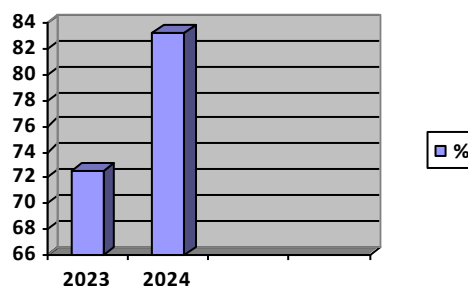
Sedangkan capaian tingkat hunian akomodasi di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 adalah 32,62% dan 26,50% untuk capaian tahun 2024 sampai dengan periode November, sehingga secara rata-rata terjadi penurunan capaian sebesar -18,76%.



Adapun capaian tingkat hunian akomodasi secara nasional tahun 2023 adalah 51,12% dan 54,96% untuk capaian tahun 2024, sehingga terjadi kenaikan capaian sebesar 7,51%.

#### 4. Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Izin

Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Rasio
	target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian	
Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki izin		72,57%	100%	73,57 %	83,23%	113,13%	14,69 %



Capaian indikator persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki izin tahun 2023 adalah 72,57% dan 83,23% untuk capaian tahun 2024, sehingga terjadi kenaikan sebesar 14,69%. Beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Adanya kemudahan dalam proses perizinan  
Kemudahan proses perizinan seperti digitalisasi layanan dan simplifikasi prosedur.
2. Adanya dukungan kebijakan pemerintah yang mendorong pelaku ekonomi kreatif untuk mengurus perizinan seperti insentif pajak, pendanaan atau pelatihan yang hanya diberikan kepada pelaku ekonomi kreatif yang dibina.
3. Peningkatan kesadaran pelaku usaha  
Pelaku ekonomi kreatif semakin menyadari pentingnya memiliki izin usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum, akses ke program pemerintah, atau peluang pasar yang lebih besar.

4. Peningkatan aktifitas ekonomi kreatif

Pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Pangkal Pinang telah mendorong lebih banyak orang untuk terjun ke bidang ini, sehingga terjadi peningkatan jumlah pengajuan izin.

5. Promosi dan Sosialisasi Aktif

Dinas Pariwisata kota Pangkal Pinang melakukan kampanye aktif untuk mendorong para pelaku ekonomi kreatif mengurus perizinan dengan melalui aplikasi APPEKRAF ( Aplikasi Pendataan Pelaku Ekonomi Kreatif) dan event event yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata.

6. Akses Pendanaan yang Terkait dengan Legalitas

Banyak lembaga keuangan atau investor yang mensyaratkan legalitas usaha untuk memberikan akses pendanaan. Hal ini bisa memotivasi pelaku ekonomi kreatif untuk mengurus izin resmi.

Berikut perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024 Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang dengan target dalaam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 :

Indikator	Target RPD 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Analisis
Jumlah kunjungan wisatawan	214.753 orang	311.077 orang	144,85 %	Melebihi target karena adanya peningkatan event dan digital marketing
Rata-rata lama tinggal wisatawan	1 hari	1,62 hari	162 %	Rate akomodasi yang terjangkau dan meningkatnya daya tarik wisata
Tingkat hunian akomodasi	25%	32,20%	128,80 %	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan banyaknya libur nasional
Persentase pelaku ekraf yang memiliki izin	73,57%	83,23%	113,13 %	Perizinan diperlukan dalam kemudahan untuk berusaha dan mendapatkan bantuan

**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Capaian Kinerja serta Penganggaran yang Mendukung Terhadap Pencapaian  
Sasaran “Meningkatnya Daya Tarik Daerah Tujuan Wisata”**

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,30	74,45	4.200.418.925	4.018.230.683	
					Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Nilai	100	100			
		1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP	%	100	100	3.417.408.065	3.262.278.462	
				a .	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	34	28	3.417.408.065	3.262.278.462
		2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	%	100	100	194.176.400	190.316.905	
				a .	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	4.886.000	4.243.000
				b .	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	21.007.400	18.864.100

			c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	18.283.000	17.392.500
			d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	150.000.000	149.817.305
		3.		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>33.700.000</b>	<b>33.700.000</b>
			a	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	23	23	33.700.000	33.700.000
		4.		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>372.463.960</b>	<b>355.289.889</b>
			a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	82.400.000	70.399.419
			b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	27.800.000	27.379.250
			c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	262.263.960	257.511.220
		5.		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>182.670.500</b>	<b>176.645.427</b>

			a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	39.264.500	36.092.220
			b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	35.830.000	33.252.300
			c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	1	107.576.000	107.300.907
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>				<b>Persentase daya tarik wisata milik pemerintah yang dikembangkan kualitasnya</b>	<b>%</b>	<b>6</b>	<b>18,03</b>	<b>4.566.613.064</b>	<b>4.437.126.033</b>
		<b>1.</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>%</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>531.382.200</b>	<b>526.240.970</b>
			a	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	531.382.200	526.240.970

		2.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	%	100	100	4.035.230.864	3.910.885.063
				a	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	16	16	3.749.933.264	3.645.295.293
				b	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	2	3	285.297.600	265.589.770
III	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					Persentase Daya Tarik Wisata yang dipasarkan	%	37	55	869.881.768	858.956.753
		1.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			Jumlah promosi event pariwisata yang dilaksanakan	Event	5	5	869.881.768	858.956.753
						Persentase data pariwisata yang dikelola	%	100	100		
						Persentase industri pariwisata yang difasilitasi dalam kegiatan promosi Pariwisata	%	5	4		
				a	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	1	1	429.978.600	428.786.131

				b .	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	1	1	439.903.168	430.170.622
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>					<b>Persentase ekonomi kreatif yang dikembangkan</b>	<b>%</b>	<b>28,08</b>	<b>28,06</b>	<b>178.538.000</b>	<b>178.033.200</b>
		<b>1.</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>			<b>Persentase Komunitas Ekonomi Kreatif yang memperoleh insentif</b>	<b>%</b>	<b>67</b>	<b>77,78</b>	<b>178.538.000</b>	<b>178.033.200</b>
				a .	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen	1	1	178.538.000	178.033.200
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>					<b>Persentase peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif</b>	<b>%</b>	<b>22</b>	<b>36,84</b>	<b>354.767.600</b>	<b>340.918.768</b>
		<b>1.</b>	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>			<b>Persentase Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	<b>%</b>	<b>24</b>	<b>8,32</b>	<b>103.594.300</b>	<b>101.819.047</b>

			a .	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	40	40	103.594.300	101.819.047
		2.	<b>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>		<b>Persentase SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif yang memperoleh Sertifikasi</b>	<b>%</b>	<b>4</b>	<b>3,12</b>	<b>251.173.300</b>	<b>239.099.721</b>
			a .	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	40	40	137.345.300	129.484.000
			b .	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang	20	20	113.828.000	109.615.721
<b>JUMLAH</b>									<b>10.170.219.357</b>	<b>9.833.265.436,40</b>



### 3.4. Analisis Keuangan

Laporan Realisasi pelaksanaan anggaran Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang untuk tahun anggaran 2024 meliputi pokok-pokok sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran Pendapatan
2. Realisasi Anggaran Belanja Operasional
3. Realisasi Anggaran Belanja Modal

Adapun rincian masing-masing diuraikan di bawah ini :

#### 1. Realisasi Anggaran Pendapatan

Realisasi pendapatan asli daerah periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 pada Dinas Pariwisata sebesar Rp. 97.115.000,00 atau 38,85% dari target sebesar Rp. 250.000.000,00, yang merupakan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Perda Kota Pangkal Pinang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Adapun untuk pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata pada tahun 2024 mencapai Rp. 32.288.589.984,50 atau 17,58% dari total PAD sebesar Rp. 200.725.271.408,80. Sedangkan capaian pada tahun 2023 mencapai Rp. 36.778.365.275,00 atau 18,64% dari total PAD sebesar Rp. 178.137.400.477,00. Terjadi penurunan realisasi PAD sektor pariwisata tahun 2024 dari tahun 2023 sebesar -5,69%.

#### 2. Realisasi Anggaran Belanja Operasional

Realisasi anggaran belanja operasional tahun 2024 yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang jasa pada Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang sebesar Rp 7.012.172.222,57 atau 95,67% dari dana yang tersedia dalam APBD sebesar Rp 7.329.264.357,00.

Sedangkan realisasi belanja operasional tahun 2023 pada Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang sebesar Rp 7.248.170.347,00 atau 98,55% dari dana yang tersedia dalam APBD sebesar Rp 7.354.658.313,00.

### 3. Realisasi Anggaran Belanja Modal

Realisasi anggaran belanja modal pada Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 sebesar Rp. 2.821.093.213,83 atau 99,30% dari dana yang tersedia dalam APBD sebesar Rp 2.840.955.000,00.

Sedangkan realisasi belanja modal pada Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 sebesar Rp. 599.851.700,00 atau 97,64% dari dana yang tersedia dalam APBD sebesar Rp 614.340.000,00.

Pada tahun 2024 Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang mendapatkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk pembangunan di Kawasan Pantai Pasir Padi Kota Pangkal Pinang.

#### **Perbandingan Belanja pada Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 dan Tahun 2024**

<b>Tahun / Uraian</b>	<b>Tahun 2023</b>			<b>Tahun 2024</b>		
	<b>Pagu (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>(%)</b>	<b>Pagu (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>Belanja</b>	7.968.998.313,00	7.848.022.047,00	98,48	10.170.219.357,00	9.833.265.436,40	96,69
<b>Belanja Operasio nal</b>	7.354.658.313,00	7.248.170.347,00	98,55	7.329.264.357,00	7.012.172.222,57	95,67
<b>Belanja Modal</b>	614.340.000,00	599.851.700,00	97,64	2.840.955.000,00	2.821.093.213,83	99,30

Dari tabel di atas dapat disimpulkan anggaran tahun 2024 lebih besar dari anggaran tahun 2023, hal ini dikarenakan pada tahun 2024 Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang mendapatkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sedangkan pada tahun 2023 Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang tidak mendapatkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK). Tetapi untuk realisasi belanja keseluruhan secara rata-rata persentase pada tahun 2023 lebih dari besar dari tahun 2024.

### **3.5. Analisis Ketersediaan SDM Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran**

Pada periode Desember 2024 Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang memiliki Personalia/ Sumber Daya Manusia berjumlah 75 orang terdiri atas 28 ASN dan 45 PHL.

Masih adanya beberapa jabatan struktural (subkoordinator) yang belum terisi, kemudian distribusi pelaksana yang tidak seimbang sehingga memperlambat pencapaian sasaran. Dan masih banyaknya pegawai yang belum memahami tupoksi sehingga belum maksimal dan tidak terarah dalam pelaksanaan penugasan kedinasan.

### **3.6. Evaluasi dan Tindak Lanjut**

Hasil evaluasi atas laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang tahun 2023 belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Beranjak dari kenyataan itu, sudah selayaknya ada perbaikan yang berkesinambungan atas pelaporan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang. Hal tersebut dapat dimulai dari bidang-bidang secara teknis dalam hal pemenuhan permintaan data, dengan menggunakan strategi yang tepat dalam mendapatkan data sebagai penunjang dalam penyusunan LAKIP Dinas Pariwisata. Adapun kendala teknis lainnya dalam pencapaian pelaporan yang baik dan benar adalah menyangkut daya dukung renstra/program, kegiatan dan sub kegiatan dalam menyokong pencapaian RENSTRA Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang yang secara bertahap harus disempurnakan.

Hasil evaluasi LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang tahun 2023, digambarkan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang melaksanakan monitoring dan evaluasi pengukuran capaian kinerja triwulan 1,2,3 dan 4 dibuktikan dengan adanya notulen/ lembar monev, disertai daftar hadir yang ditandatangani oleh kepala Kepala Dinas Pariwisata;
2. Menyampaikan pengajuan, agar Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Pariwisata direviu oleh APIP sebelum dilaporkan; dan
3. Penyajian informasi kinerja agar menjadi kepedulian setiap asn, dengan

cara melibatkan seluruh unit dan asn dalam pembahasan dan penyusunan laporan kinerja dan diadministrasikan secara lengkap.

Pada tahun 2024 terjadi tren penurunan dan kenaikan pada indikator yang mendukung pencapaian sasaran “***Meningkatnya daya tarik daerah tujuan wisata***”, hal ini dikarenakan pasca terjadinya pandemi covid-19 yang berdampak sangat besar terhadap industri kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Adapun tindak lanjut atau langkah yang dapat dilakukan untuk peningkatan pencapaian sasaran tersebut antara lain :

- a. Peningkatan kualitas layanan pariwisata
- b. Peningkatan aksesibilitas ke kawasan wisata
- c. Pengembangan infrastruktur yang ada di kawasan wisata
- d. Melakukan promosi pariwisata
- e. Melestarikan lingkungan destinasi wisata
- f. Pengembangan produk pariwisata yang beragam
- g. Pengembangan kemitraan dengan pihak ketiga
- h. Memperkuat branding destinasi pariwisata
- i. Mengembangkan pemasaran pariwisata yang efektif, efisien dan tepat sasaran

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Simpulan Capaian Kinerja**

Pada tahun 2024, persentase kunjungan wisatawan sebesar 114,85% dari target, rata-rata lama tinggal wisatawan 162% dari target, untuk tingkat hunian akomodasi 128,80% dari target dan persentase pelaku ekraf yang memiliki izin 113,13% dari target. Namun terjadi penurunan realisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata sebesar -5,69% dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian tahun ini sudah hampir mendekati pencapaian sebelum terjadinya pandemi covid-19. Untuk itu bangkitnya dunia kepariwisataan dan ekonomi kreatif menempati posisi strategis dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi covid-19, dimana industri pariwisata menjadi salah satu industri yang terdampak pandemi ini, bukan hanya pada tingkat regional, tetapi juga nasional dan internasional. Mengingat posisi strategis tersebut diharapkan pembangunan pariwisata dapat berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan kepariwisataan kedepan, Kota Pangkal Pinang memerlukan pengelolaan secara terpadu baik pemerintah, swasta dan perguruan tinggi serta masyarakat.

#### **4.2. Permasalahan dan Tantangan**

Pembangunan kepariwisataan saat ini masih dihadapkan pada permasalahan dan tantangan antara lain :

1. Kurangnya SDM pariwisata yang mampu mengolah dan mengatur produk serta jasa layanan wisata
2. Keterbatasan infrastruktur pariwisata yang mendukung kenyamanan wisatawan
3. Investasi yang masih kurang
4. Kurangnya inovasi dalam promosi pariwisata yang berbasis digital
5. Belum maksimalnya pembinaan sektor ekonomi kreatif

#### **4.3. Rekomendasi Perbaikan**

Dari kondisi tersebut dapat dilakukan langkah-langkah agar dapat mendukung tercapainya sasaran yang diinginkan, antara lain :

1. Meningkatkan pelatihan dan pendampingan UMKM sektor ekonomi kreatif agar mereka lebih siap berkontribusi dalam industri pariwisata
2. Meningkatkan investasi di sektor pariwisata
3. Mengoptimalkan pengembangan wisata yang berbasis ekonomi kreatif
4. Mengoptimalkan penganggaran yang mendukung pengembangan kepariwisataan
5. Optimalisasi promosi digital melalui media sosial, influencer dan platform pariwisata nasional untuk meningkatkan daya tarik wisatawan

#### **4.4. Harapan dan Komitmen Kedepan**

Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk meningkatkan daya tarik destinasi wisata dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pariwisata, membuat rencana pengembangan pariwisata yang terarah, menarik investor, memperbaiki sistem pemasaran serta mengoptimalkan anggaran secara efektif guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

LAMPIRAN :

**TABEL TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PARIWISATA KOTA PANGKAL PINANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya daya tarik daerah tujuan wisata	Jumlah kunjungan wisatawan	214.753 orang	311.077 orang
		Rata-rata lama tinggal wisatawan	1 hari	1,62 hari
		Tingkat hunian akomodasi	25%	32,20%
		Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki izin	73,57%	83,23%